

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setiap surat kabar atau majalah memiliki ciri khasnya masing-masing. Ada media yang khusus membahas berita politik, ada majalah yang membahas mengenai budaya negara, ada yang khusus membahas otomotif, tanaman, iptek, dan lain sebagainya. Semua majalah unik, demikian pula majalah yang membahas masalah politik memiliki ciri khas sendiri dalam memproses beritanya.

Dalam majalah Forum Keadilan, elemen-elemen yang menarik bukan gambar-gambar yang eksotis, namun tulisan-tulisannya yang menyindir dan provokatif, sehingga menggelitik hati peneliti untuk melakukan pengamatan. Gambar-gambar atau foto-foto yang ada dalam rubrik forum utama majalah ini tidak ada satu pun yang murni hasil jepretan wartawan forum, melainkan hasil comotan dari sumber lain seperti kantor berita Antara dan situs-situs berita online.

Penulis ingin melakukan penelitian ini karena penulis ingin mengetahui bagaimana konstruksi berita tentang anggota-anggota legislatif bermasalah dalam majalah Forum, mengingat majalah ini termasuk salah satu majalah yang tulisannya cukup menggelitik. Penulis menggunakan analisis wacana Norman Fairclough yang ditekankan pada tiga tingkatan, yakni representasi, relasi, dan identitas.

Selain analisis, penulis juga melakukan wawancara dengan tiga pihak. Diantaranya redaktur pelaksana majalah Forum Keadilan Julie Indahrini selaku pihak

media, ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung Adi Marsiela sebagai pihak pengamat/ahli media, serta penikmat majalah politik Sugiharto Purnama, sebagai pihak pembaca. Hasil wawancara tersebut akan penulis bandingkan dengan hasil pengamatan penulis, yang nantinya akan ditarik kesimpulan akhir sebagai hasil penelitian.

4.1.1 Representasi pada Pemberitaan tentang Anggota Legislatif Korupsi dalam rubrik Forum Utama Majalah Forum Keadilan Edisi 29 September – 5 Oktober 2014

Menurut Fairclough, representasi itu adalah bagaimana peristiwa orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apa pun ditampilkan dan digambarkan dalam teks. Hal yang akan dianalisis menurut dimensi representasi, yakni struktur dari teks wacana itu sendiri. Dalam hal ini penulis menganalisis tentang berita forum utama yang digunakan majalah Forum Keadilan ini permasalahan awalnya apa, berita mengarah kemana, dan lebih kepada keseluruhan berita itu seperti apa.

Representasi berdasarkan jenisnya dalam model Norman Faiclough, dibedakan menjadi tiga macam, yaitu representasi dalam anak kalimat, representasi dalam kombinasi anak kalimat, dan representasi dalam rangkaian antar kalimat. Ketiganya adalah pisau analisis yang akan membongkar teks berita dari sisi redaksional.

4.1.1.1 Analisis Representasi dalam Anak Kalimat

Seringkali dalam pemberitaan, anak kalimat menjadi ciri khas suatu media dalam penyajian berita. Pilihan kosakata yang mereka terapkan, serta penggunaan bahasa metafora yang dipaparkan pada suatu tulisan, akan dinilai berbeda pemaknaannya, karena media itu mengonstruksi isi berita sesuai dengan visi-misi mereka. Berikut ini adalah temuan dari analisis representasi pada anak kalimat yang peneliti dapatkan dalam teks berita dalam rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan edisi 29 September – 5 Oktober 2014:

Tabel 4.1

Representasi Anak Kalimat dalam rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan edisi 29 September – 5 Oktober 2014:

No	Representasi pada Anak Kalimat
1	Buruk Rupa Wajah Parlemen (Judul salah satu berita, hal 12)
2	Dan hal ini juga berarti membiarkan bangsa ini mempertaruhkan nasibnya kepada para kriminil yang sukses membajak sistem demokrasi yang diraih rakyat dengan susah payah. (Paragraf 2 dalam berita “Membajak Demokrasi”, hal 11)
3	Tanggal 1 September 2014. Kawasan pertigaan Jalan Asia-Afrika dan Jalan Alun-alun timur Bandung penuh dengan massa. (Paragraf 1 dalam berita “Buruk Rupa Wajah Parlemen, hal 12)
4	Dari 10 partai politik yang bisa masuk parlemen, 9 diantaranya menyeter koruptor ke kursi parlemen. (Paragraf 6 dalam berita “Buruk Rupa Wajah Parlemen, hal 13)
5	Longok saja UU tentang Pemilihan Kepala Daerah (gubernur, bupati, dan walikota) yang baru disahkan DPR, Jumat dini hari pekan lalu. (Paragraf 2

	dalam berita “Rendah Moral Karena Syarat Longgar”, hal 20)
6	Dan, sudah barang tentu dengan pemilihan melalui DPRD, catatan kelam sang calon akan diabaikan. Sebab, sudah menjadi pilihan para anggota dewan yang terhormat. (Paragraf 6 dalam berita “Rendah Moral Karena Syarat Longgar, hal 21)

Dalam Representasi, aspek anak kalimat ini berkaitan dengan konten dalam berita tersebut, yaitu mengenai bagaimana keadaan dan peristiwa diberitakan, terutama dari segi pembahasan yang dilakukan dalam redaksional Forum Keadilan terhadap berita dalam rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan edisi 29 September – 5 Oktober 2014. Dalam pemberitaan tersebut, wartawan merepresentasikan anak kalimat ini dari dua segi, yaitu kosakata yang dipilih, dan satu lagi pilihan mereka dari segi ketatabahasaan anak kalimat metafora. Dari metafora ini, dapat dilihat bagaimana emosi atau maksud wartawan dalam menuliskan beritanya. dengan begitu, pilihan wartawan dalam merepresentasikan berita akan mempengaruhi pada konten berita, serta dapat dilihat pula bagaimana kualitas wartawan dalam mengolah dan menyampaikan pesan dengan bahasa yang mereka gunakan.

Salah satu contoh pemilihan metafora dalam pemberitaan dalam rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan yaitu seperti di bawah ini:

“Buruk Rupa Wajah Parlemen” (Judul salah satu berita, hal 12)

Dalam salah satu judul berita dalam rubrik Forum Utama tersebut, wartawan Forum menggunakan kalimat “Buruk Rupa Wajah Parlemen”, pada halaman 12, yang

merepresentasikan bahwa parlemen atau anggota-anggota DPR itu adalah orang yang benar-benar buruk, karena pemilihan metafora “Buruk Rupa” itu provokatif dan mengundang pembaca untuk lebih berpikir, yaitu seburuk apakah parlemen sekarang ini. Judul tersebut bisa dibilang dramatisasi atau hiperbola.

Para anggota parlemen itu memang banyak yang korupsi yaitu sebanyak 48 orang menurut laporan ICW. Namun, dilihat dari bahasa yang digunakan dalam judul berita ini, Forum Keadilan tampak men-*judge* bahwa parlemen di Indonesia itu sangat buruk.

Selain judul di atas, ada lagi contoh penggunaan metafora yang dilakukan oleh Forum Keadilan, yakni sebagai berikut:

“Dan hal ini juga berarti membiarkan bangsa ini mempertaruhkan nasibnya kepada para kriminal yang sukses membajak sistem demokrasi yang diraih rakyat dengan susah payah.” (Paragraf 2 dalam berita “Membajak Demokrasi”, hal 11)

Dalam paragraf tersebut, dijelaskan mengenai bagaimana tingginya jumlah koruptor yang menduduki kursi legislatif, sehingga rakyat menjadi korban karena kesejahteraan mereka dikebiri oleh para pejabat pemerintahan. Majalah Forum menggunakan pemilihan kata metafor “kriminal” untuk para pejabat. Hal tersebut adalah penggambaran oleh Forum Keadilan bahwa banyak diantara para pejabat negara yang dimana mereka itu adalah para kriminal. Jadi majalah Forum Keadilan seakan dengan kalimatnya ingin memberitahu pada masyarakat bahwa pemerintahan negara itu kriminal.

Media memang tidak langsung mempublikasikan beritanya saat berita tersebut selesai diketik oleh wartawan, namun akan melewati proses editorial terlebih dahulu, supaya kalimat atau pernyataan yang kurang sesuai dengan keinginan media diubah atau diganti. Dalam hal ini, Forum Keadilan pada dasarnya akan melakukan hal yang serupa.

“Menurut Fairclough, pilihan pada metafora merupakan kunci bagaimana realitas ditampilkan dan dibedakan dengan yang lain. Metafora bukan hanya persoalan keindahan literer, karena bisa menentukan apakah realitas itu dimaknai dan dikategorikan sebagai positif atau negatif.” (Eriyanto, 2008:292)

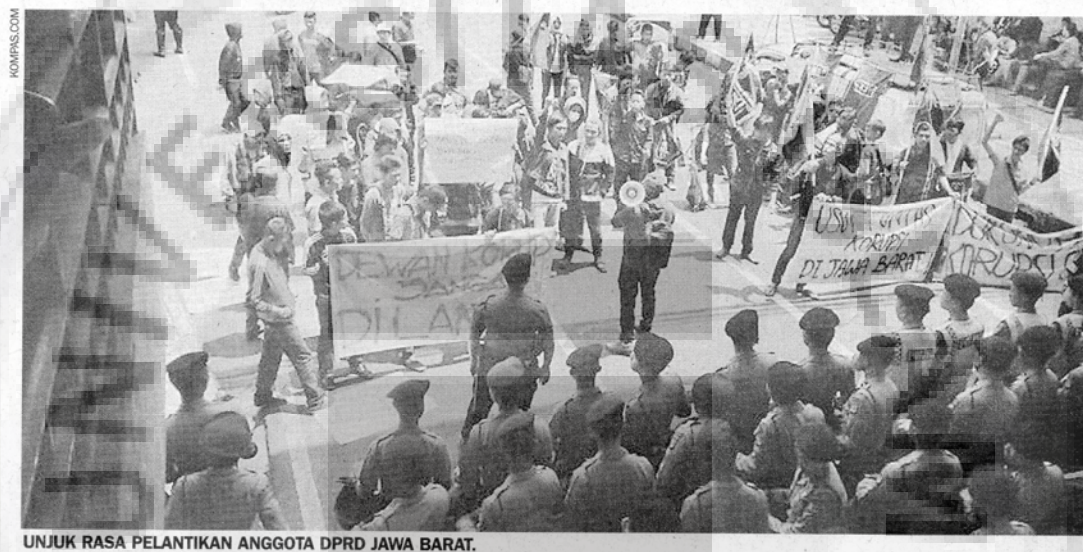
Selain metafora, peneliti juga menemukan potongan-potongan kalimat di rubrik utama majalah Forum Keadilan edisi 9 September – 5 Oktober 2012 yang menarik jika dilihat dari segi kosakatanya. Salah satunya seperti di bawah ini:

“Tanggal 1 September 2014. Kawasan pertigaan Jalan Asia-Afrika dan Jalan Alun-alun timur Bandung penuh dengan massa.” (Paragraf 1 dalam berita “Buruk Rupa Wajah Parlemen, hal 12)

Dalam potongan tersebut, majalah Forum Keadilan merepresentasikan bahwa kawasan pertigaan di Jalan Asia Afrika penuh dengan massa. Mereka para mahasiswa berdemo karena ketidaksetujuan mereka atas banyaknya koruptor yang dilantik menjadi anggota parlemen.

Seperti yang kita lihat, majalah Forum Keadilan menulis “penuh dengan massa” pada kalimat pertama. Jadi pendemo di kawasan Asia-Afrika itu nampaknya harus berdesakan untuk menyalurkan aspirasi mereka. Namun, foto dalam halaman yang sama di berita itu justru menggambarkan suasana yang kurang tepat dengan pernyataan di atas. Jika majalah Forum Keadilan menulis “penuh”, tapi di foto yang

diambil dari situs kompas.com tersebut hanya terlihat para pendemo hanya berjumlah puluhan orang, tidak sampai memenuhi kawasan pertigaan Asia-Afrika. Jumlah mereka terlihat tidak jauh lebih banyak dari polisi yang mengamankan area. Hal itu bisa dilihat dari foto di bawah ini:



UNJUK RASA PELANTIKAN ANGGOTA DPRD JAWA BARAT.

12 FORUM KEADILAN: No. 21, 05 OKTOBER 2014

Gambar 4.1.

Foto massa berdemo dalam majalah Forum Keadilan

Meskipun bisa diperdebatkan apakah massa itu dapat tergolong memenuhi Jalan Asia Afrika atau tidak, namun dari pernyataan di atas sudah dapat diketahui bahwa majalah Forum Keadilan menggunakan kata “penuh” untuk memberikan penekanan lebih kepada para pendemo, bahwa pendemo itu banyak. Karena pendemo banyak, maka hal yang didemokan adalah hal yang penting.

Jadi, pada intinya majalah Forum Keadilan terlihat memberikan simpati atau keberpihakan kepada pihak pendemo, hal itu bisa terjadi karena pihak Forum

Keadilan memiliki keyakinan dan kepentingan yang sama dengan para pendemo atau mahasiswa tersebut.

Di lain hal tersebut, ada pula potongan kalimat di majalah Forum Keadilan edisi 29 September – 5 Oktober 2014 yang kurang tepat untuk digunakan, karena tidak sesuai dengan kode etik. Berikut adalah kalimatnya:

“Dari 10 partai politik yang bisa masuk parlemen, 9 diantaranya menyetor koruptor ke kursi parlemen.” (Paragraf 6 dalam berita “Buruk Rupa Wajah Parlemen, hal 13)

Dalam kalimat yang ditulis daam majalah Forum Keadilan tersebut, ditulis bahwa ada 9 partai yang menyumbang koruptor ke kursi parlemen. Forum Keadilan memberi labelisasi “koruptor” pada para anggota legislatif bermasalah tersebut. Hal itu melanggar asas praduga tak bersalah yang juga bagian dari kode etik jurnalistik.

Dalam undang-undang no. 40 tahun 1999 pasal 5 ayat 1 menjelaskan, bahwa Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (Persatuan Wartawan Indonesia: 2015).

Padahal, anggota-anggota legislatif yang disebutkan dalam majalah tersebut sebagian besar masih berstatus tersangka. Bahkan yang sudah menjadi terdakwa pun harus tidak boleh dianggap bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Penulis mendapatkan informasi tersebut setelah mewawancarai ahli media, Adi Marsiela. Menurutnya, dalam hal ini majalah Forum Keadilan telah melanggar kode etik.

“Soal labelisasi koruptor, buat saya itu terlalu dini dan melanggar asas praduga tak bersalah. Itu masalah bagi saya dan Forum melakukan pelanggaran itu.” – Adi Marsiela

Selain kalimat mengenai labelisasi di atas, potongan kalimat di bawah ini juga

merupakan konstruksi majalah Forum Keadilan dalam rubrik Forum Utama majalah

Forum Keadilan edisi 29 September – 5 Oktober 2014:

“Longok saja UU tentang Pemilihan Kepala Daerah (gubernur, bupati, dan walikota) yang baru disahkan DPR, Jumat dini hari pekan lalu.” (Paragraf 2 dalam berita “Rendah Moral Karena Syarat Longgar”, hal 20)

Dalam kalimat di atas, Forum Keadilan menjelaskan bahwa ada Undang-Undang baru yang tidak lama disahkan DPR, namun dalam undang-undang tersebut tidak ada satu pasal pun yang membahas soal moral. Padahal, moral merupakan hal yang sangat penting, karena itu adalah akar dari sifat baik dan buruknya para anggota parlemen. Namun yang harus digarisbawahi adalah Forum keadilan menggunakan kata “longok”. Longok artinya melihat, atau menengok. Namun, kata longok adalah peyorasi dari kata lihat atau tengok, karena longok jarang digunakan dalam tata bahasa Indonesia. Karena seperti bentuk pemburukan makna, pihak Forum Keadilan dalam kalimat ini merepresentasikan perasaan tidak senangnya kepada Undang-Undang yang baru disahkan DPR.

Ada satu lagi potongan berita dalam rubrik Forum Utama di majalah Forum Keadilan edisi 29 September – 5 Oktober 2014 yang menarik, yaitu seperti pada di bawah ini:

“Dan, sudah barang tentu dengan pemilihan melalui DPRD, catatan kelam sang calon akan diabaikan. Sebab, sudah menjadi pilihan para anggota dewan yang terhormat.” (Paragraf 6 dalam berita “Rendah Moral Karena Syarat Longgar, hal 21)

Dalam kalimat di atas, dijelaskan bahwa para mantan terpidana bisa mengikuti pemilihan DPRD, karena adanya Undang-Undang yang meringankan syarat-syarat mereka untuk memasuki kursi pemihan umum. Dalam kalimat tersebut, ada dua hal yang menarik untuk ditelusuri. Pertama, majalah Forum Keadilan menuliskan “catatan kelam” dalam kalimat pertama. Jadi, pihak mantan terpidana digambarkan memiliki masa lalu yang suram. Itu adalah bentuk majas hiperbola yang ditulis oleh wartawan Forum Keadilan, sehingga para legislator digambarkan tampak seperti orang yang punya masa lalu kelam. Maka Forum Keadilan terlihat menunjukkan rasa ketidak senangannya terhadap para legislator dari kalimat tersebut.

Yang kedua, bisa dilihat dari penggunaan kalimat yang kedua, wartawan Forum Keadilan menulis “para anggota dewan yang terhormat”. Padahal, pada kalimat sebelumnya ia menulis tentang betapa kelamnya catatan hidup sang calon legislatif. Dilihat dari kontrasnya kedua materi yang dibahas oleh sang wartawan, pernyataan tersebut tampak sebagai sindiran atau ironi bagi calon legislatif, bahwa ia sepatutnya adalah orang yang terhormat, tetapi calon tersebut malah pernah melakukan perbuatan kriminal yang jelas bukan dikategorikan dalam kriminal skala teri.

Representasi pemberitaan di rubrik Forum Utama dalam majalah Forum Keadilan edisi 29 September – 5 Oktober 2014 telah menggambarkan bahwa majalah ini banyak menggunakan pilihan-pilihan kata yang hiperbola untuk menarik pembaca. Dimulai dari judul yang bersifat perendahan makna dan pemilihan metafora lainnya

yang rata-rata menyudutkan pihak DPR dan pemerintah. Pihak anggota parlemen disini digambarkan adalah kriminal, bertolak belakang dengan posisi mereka yakni pejabat yang sepatutnya dihormati rakyatnya. Di sisi lain, majalah Forum Keadilan tampak menunjukkan keberpihakan mereka terhadap para pendemo di jalan Asia Afrika. Namun, pelabelan “koruptor” yang dilakukan majalah Forum bisa menjadi masalah serius apabila ditelusuri lebih lanjut, karena hal ini melanggar kode etik jurnalistik.

4.1.1.2 Analisis Representasi dalam Kombinasi Anak Kalimat

Setelah peneliti menganalisis berita-berita di rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan edisi 29 September – 5 Oktober 2014, peneliti menemukan adanya teks yang termasuk dalam representasi dalam kombinasi dalam anak kalimat, yakni seperti yang dijelaskan pada bagan bawah ini:

Tabel 4.2

Representasi dalam Kombinasi Anak Kalimat di rubrik Forum Utama dalam majalah Forum Keadilan Edisi 29 September – 5 Oktober 2014

No	Representasi dalam Kombinasi Anak kalimat
1	Seakan tidak memperdulikan para mahasiswa yang berpanas-panasan di luar, dalam ruang berpendingin di Gedung Merdeka, 100 anggota DPRD Jawa Barat hari itu dilantik. (Paragraf 3 dalam berita “Buruk Rupa Wajah Parlemen, hal 12)
2	Tak perlu repot-repot lagi menebar uang kepada jutaan rakyat pemilihnya atau memoles diri dengan beriklan di media massa. (Paragraf 6 dalam berita “Rendah Moral Karena Syarat Longgar, hal 21)

Kalimat tersebut adalah bentuk penggabungan anak kalimat dengan kalimat lainnya yang ditulis oleh wartawan Forum Keadilan terhadap rubrik Forum Utama edisi 29 September – 5 Oktober 2014. Representasi antara satu anak kalimat dengan anak kalimat lainnya dapat digabung, sehingga bentuk antar-kalimat tersebut akan membentuk suatu pengertian yang dapat dimaknai.

Representasi kombinasi antara satu anak kalimat dengan kalimat yang lainnya adalah untuk menjadi penjelas dari koherensi suatu kalimat atau teks yang diproduksi oleh wartawan Forum Keadilan. Hal ini menjadikan penggabungan anak kalimat itu suatu bahasa yang memaparkan mengenai isi teks yang ditulis wartawan Forum Keadilan. Dalam rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan edisi 29 September – 5 Oktober 2014, salah satu contoh representasi gabungan antara anak kalimat dan kalimat yang lainnya adalah:

“Seakan tidak memperdulikan para mahasiswa yang berpanas-panasan di luar, dalam ruang berpendingin di Gedung Merdeka, 100 anggota DPRD Jawa Barat hari itu dilantik.” (Paragraf 3 dalam berita “Buruk Rupa Wajah Parlemen, hal 12)

Dalam berita di atas, mahasiswa digambarkan sedang berdemo pada tengah hari untuk memprotes anggota-anggota dewan korupsi yang tengah dilantik, salah satunya mereka menyoroti Yance. Wartawan Forum Keadilan menjelaskan kejadian tersebut dengan sedikit mendramatisir, yaitu menyebutkan dua suasana yang kontras, yakni antara kondisi para mahasiswa yang sedang berdemo, dibandingkan dengan kondisi ruangan para anggota dewan korupsi yang tengah dilantik. Di berita tersebut

tertulis, bahwa mahasiswa yang berpanas-panasan tidak diperdulikan oleh 100 anggota DPRD, yang mana mereka justru sedang nyaman dengan berada di ruangan ber-AC.

Sebetulnya kondisi ruangan ber-AC itu tidak terlalu penting untuk dipaparkan, mengingat ruangan para pejabat sudah sewajarnya menggunakan AC. Namun, Forum Keadilan tampak menambahkan hal itu sebagai “bumbu pemedas”, yang bisa saja bertujuan untuk memberi rasa simpati kepada pembaca agar mereka ikut geram terhadap pemerintah.

Salah satu pembaca yang kesal adalah Sugiharto, selaku penikmat majalah politik. Saat penulis wawancarai, ia mengaku merasa kesal pada DPR setelah membaca rubrik Forum Utama dalam majalah ini. Hal ini dapat sejalan dengan teori hegemoni Gramsci, di mana pihak yang berkuasa memberikan kepemimpinan moral dan intelektual kepada masyarakat, yang akhirnya ideologi tersebut dapat menembus di luar kesadaran (Strinati, 1995: 141).

Selain itu penulis juga mewawancarai ahli media, Adi Marsiela. Menurutnya kalimat yang digunakan dalam paragraf tersebut adalah bentuk dramatisasi, karena Forum Keadilan ingin menunjukkan sesuatu secara tidak langsung.

“Buat saya sih dramatisasi kalo ini *mah*. Ini kan feature, jadi meski berdasarkan fakta, dia ngomongnya: “seakan tidak memperdulikan”, jadi dia pun membayangkan hal tersebut. Meski tidak menunjuk langsung, tapi kira-kira begitulah sikap Forum Keadilan.” – Adi Marsiela

Meski begitu, penulis tetap beranggapan bahwa dramatisasi yang dilakukan oleh Forum Keadilan adalah bentuk pembelaan pada mahasiswa dan juga merupakan

bentuk penyindiran kepada anggota parlemen. Selain itu, hal tersebut dapat membuat kesal bagi pembaca tertentu.

Kemudian, selain kalimat di atas ada pula kalimat lain yang merupakan representasi dalam kombinasi anak kalimat, yakni:

“Tak perlu repot-repot lagi menebar uang kepada jutaan rakyat pemilihnya atau memoles diri dengan beriklan di media massa.” (Paragraf 6 dalam berita “Rendah Moral Karena Syarat Longgar, hal 21)

Kalimat di atas juga merupakan kalimat kombinasi antara dua kalimat. Di mana kalimat pertama menyatakan bahwa anggota dewan tidak perlu menebar uang kepada rakyat pemilihnya, sedangkan kalimat kedua memaparkan tentang anggota dewan yang juga tidak perlu bersolek untuk mengambil hati masyarakat lewat media iklan.

Mirip seperti analisis sebelumnya, kalimat di atas juga terlihat seperti *judgement* yang diberikan oleh majalah Forum Keadilan kepada Pemerintah, yakni wartawan Forum Keadilan seakan menunjukkan bahwa anggota dewan selama ini sering bertengger di TV atau membuat suatu acara panggung untuk menarik massa agar dirinya dipilih. Menarik massa seperti itu tentu tidak gratis, maka wartawan Forum Keadilan menulis “menebar uang”, yang berarti para pejabat ini memberikan uang kepada masyarakat supaya mereka memilihnya. Meski hal bagi-bagi uang tersebut tak mereka cantumkan buktinya di tulisan, namun hal ini sudah menjadi rahasia umum.

“Dalam proses kerja penulisan berita, wartawan pada dasarnya membuat abstraksi bagaimana fakta-fakta yang saling terpisah dan tercerai-berai digabungkan sehingga menjadi suatu kisah yang dapat dipahami oleh

khalayak dan membentuk suatu pengertian. Gabungan antara anak kalimat ini akan membentuk koherensi lokal, yaitu pengertian yang didapat dari gabungan anak kalimat satu dengan yang lain, sehingga kalimat itu mempunyai arti.” (Eriyanto, 2008: 294).

Dari potongan berita Forum Keadilan tersebut, bisa disimpulkan bahwa bentuk penggabungan anak kalimat yang ditulis oleh wartawan Forum Keadilan itu memiliki maksud tersendiri. Wartawan Forum Keadilan seakan menyudutkan pemerintah dengan menyebut bahwa calon legislatif banyak yang memberi uang kepada masyarakat supaya terpilih, dan menjadikan iklan sebagai media mereka mempromosikan diri. Selain itu, wartawan Forum Keadilan juga seakan ingin masyarakat agar ikut geram melihat apa yang dilakukan anggota terlantik yang bersantai di ruangan ber-AC sementara mereka tidak menggubris para pendemo.

Julie Indahrini selaku redaktur pelaksana majalah Forum Keadilan mengatakan, bahwa semua tulisan yang dipaparkan adalah berdasarkan fakta. Mereka punya datanya. Selain itu, ia menambahkan bahwa tulisan memang dikemas dengan menarik agar pembaca mau mendalami majalah tersebut.

4.1.1.3 Representasi dalam Rangkaian Antar Kalimat

Berikut ini adalah bagan analisis teks dari segi representasi dalam rangkaian antar kalimat dalam rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan edisi 29 September – 5 Oktober 2014:

Tabel 4.3

Representasi dalam Rangkaian Antar Kalimat dalam rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan edisi 29 September – 5 Oktober 2014

No	Representasi dalam Rangkaian Antar Kalimat
1	Elit negeri ini yang selalu mengklaim kalau Indonesia adalah negara hukum tampaknya jauh dari harapan dalam penerapannya. Bahkan hukum yang dibuat pun terkesan menjadi legalisasi tindak-tanduk mereka dalam meraih jabatan. (Paragraf 1 dalam berita “Rendah Moral Karena Syarat Longgar, hal 20)
2	Dengan kata lain, UU Pilkada yang baru disahkan itu tak mempersalahkan, calon tersebut pernah membunuh, memperkosa, korupsi, atau tindak pidana lainnya. Yang penting sudah pernah menjalani hukuman tersebut. (Paragraf 5 dalam berita “Rendah Moral Karena Syarat Longgar, hal 21)
3	Anjloknya kepercayaan pada proses demokrasi tentu saja akan merugikan partai politik itu sendiri nantinya. Bukankah, partai dan demokrasi seperti ikan dan air. Jika airnya tak ada apakah ikan masih bisa hidup? (Paragraf 6 dalam berita “Membajak Demokrasi”, hal 11)

Representasi ini ada hubungannya dengan kalimat mana yang terlihat paling menonjol dibandingkan kalimat yang lainnya, yang diproduksi oleh wartawan Forum Keadilan. Jadi representasi dalam rangkaian antar kalimat ini berhubungan dengan penggabungan dua kalimat atau lebih yang disusun dan dirangkai pada bahasa yang dipakai oleh wartawan Forum Keadilan dalam rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan edisi 29 September – 5 Oktober 2014.

Aspek penting dari representasi ini adalah apakah partisipan dianggap mandiri, ataukah ditampilkan memberi reaksi dengan sudut pandang mereka sendiri dalam teks berita. Berikut ini adalah salah satu contoh representasi dalam rangkaian

antar kalimat dalam rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan edisi 29 September – 5 Oktober 2014:

“Elit negeri ini yang selalu mengklaim kalau Indonesia adalah negara hukum tampaknya jauh dari harapan dalam penerapannya. Bahkan hukum yang dibuat pun terkesan menjadi legalisasi tindak-tanduk mereka dalam meraih jabatan.” (Paragraf 1 dalam berita “Rendah Moral Karena Syarat Longgar, hal 20)

Pada pembentukan representasi dalam rangkaian antar kalimat di atas, majalah Forum Keadilan memaparkan mengenai pernyataan, yaitu Indonesia adalah negara hukum, tapi pernyataan itu dianggap oleh Forum Keadilan adalah tidak terlaksana. Kemudian di kalimat berikutnya, majalah itu memaparkan bahwa hukum merupakan legalisasi tindak-tanduk dalam meraih jabatan.

Pemilihan kalimat tersebut sebagai kalimat pembuka bukan karena tanpa alasan, terutama karena paragraf ini adalah *lead* berita. Wartawan Forum Keadilan menekankan kepada pembaca tentang kondisi Indonesia yang jauh dari negara hukum. Dengan dipilihnya kalimat tersebut, kondisi Indonesia yang bukan seperti negara hukum menjadi lebih ter-*ekspose* daripada kalimat berikutnya. Jadi, wartawan Forum Keadilan men-*judge* bahwa Indonesia ini jauh dari negara hukum, dengan ditempatkan kalimat itu sebagai kalimat awal berita.

Selain itu, ada kalimat lain yang juga mewakili representasi dalam rangkaian anak kalimat, yakni sebagai berikut:

“Dengan kata lain, UU Pilkada yang baru disahkan itu tak mempersalahkan, calon tersebut pernah membunuh, memperkosa, korupsi, atau tindak pidana lainnya. Yang penting sudah pernah menjalani hukuman tersebut.” (Paragraf 5 dalam berita “Rendah Moral Karena Syarat Longgar, hal 21)

Undang-undang pilkada yang baru terutama dalam pasal 12 huruf (f), tertulis, bahwa salah satu syarat caleg adalah tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan keputusan pengadilan dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Tapi, para calon tetap diberi peluang untuk mencalonkan diri, jika yang bersangkutan telah menjalani masa hukuman dan mengumumkannya kepada publik bahwa dirinya telah menjadi terpidana dan tidak akan mengulangi tindak pidananya.

Mengetahui statement tersebut, wartawan Forum Keadilan menuliskan kalimat yang cukup menggelitik, yaitu kalau benar pasalnya seperti itu, berarti calon yang pernah membunuh, memperkosa, narkoba, dan koruptor tidak masalah untuk melakukan pencalonan. Hal ini dituliskannya di kalimat pertama.

Forum Keadilan tampaknya ingin menginformasikan lebih jelas kepada pembaca perihal pasal yang baru tersebut, bahwa dampak dari hal itu bisa lebih kronis. Maka dari itu wartawan Forum Keadilan menambahkan beberapa contoh tindak pidana yaitu membunuh, memperkosa, dan narkoba sebagai contoh apabila pasal tersebut dilaksanakan.

Menurut Julie Indahrini selaku Redaktur Pelaksana majalah Forum Keadilan, editing tulisan akan dilakukan oleh dirinya sendiri atau Penanggung Jawab Redaksi majalah, Priyono Bandot Sumbogo, apabila semisal tulisan tersebut terlalu menyerang, atau ada opini masuk.

“Yang pasti, tulisan harus sesuai dengan kaidah jurnalistik dulu, harus cover both sides. Misalnya, ada tulisan yang terlalu menyerang, atau ada tulisan yang opini penulisnya masuk. Tulisan tersebut kadang dihapus, kadang diperhalus bahasanya.” – Julie Indahrini

Dari pernyataan Julie Indahrini tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa Forum Keadilan telah menganggap tulisan itu sudah halus atau layak cetak dalam sudut pandang majalah tersebut. Karena sudah selayaknya paragraf itu diedit dahulu oleh pemimpin redaksi. Namun, secara tidak langsung tulisan yang telah masuk ke meja editor tersebut tampak menyudutkan pihak DPR yang telah mengesahkan undang-undang tersebut.

Selain itu, rangkaian antar kalimat dalam majalah Forum Keadilan di bawah ini juga menarik untuk dibahas:

“Anjloknya kepercayaan pada proses demokrasi tentu saja akan merugikan partai politik itu sendiri nantinya. Bukankah, partai dan demokrasi seperti ikan dan air. Jika airnya tak ada apakah ikan masih bisa hidup?” (Paragraf 6 dalam berita “Membajak Demokrasi”, hal 11)

Dalam paragraf itu, hal yang ditonjolkan adalah kalimat terakhir mereka yang menyerupai kesimpulan. Dalam tulisan itu, majalah Forum Keadilan bertanya kepada pembaca, bahwa apakah ikan masih dapat hidup di tempat yang tak ada airnya.

Paragraf tersebut menarik untuk dibahas karena di dalam paragraf tersebut dimasukkan opini penulis berita. Tulisan tersebut mirip dengan tajuk rencana, karena tajuk rencana memang biasanya ditulis oleh pemimpin redaksi mengenai hal yang sedang menarik perhatian redaksi. Tetapi, dalam berita “Membajak Demokrasi” di majalah Forum Keadilan tersebut tidak dituliskan bahwa itu adalah tajuk rencana.

Menurut redaktur pelaksana Forum Keadilan Julie Indahrini saat diwawancarai penulis, berita “Membajak Demokrasi” sebenarnya adalah mukadimah, yakni semacam pembukaan atau kata pengantar dalam berita. Jadi, menurutnya

mukadimah tersebut menjelaskan mengenai rangkuman pokok-pokok permasalahan yang ada dalam rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan. Oleh karenanya, di dalam pemberitaan tersebut terkadang terdapat opini. Meski Julie Indahrini mengaku bahwa itu adalah memang gaya dari majalah, namun peneliti beranggapan bahwa sebaiknya berita mukadimah tersebut diperjelas, semacam dengan menenpatkan judul “Mukadimah” di pojok atas majalah.

Ketiga aspek representasi teks dalam pemberitaan di rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan edisi 29 September – 5 Oktober 2014 adalah bentuk dari sebuah ideologi dari wartawan Forum Keadilan yang memproduksi berita untuk dikonsumsi oleh para pembaca.

Tiap-tiap media biasanya memiliki ideologi atau visi-misi tertentu dalam pengonstruksian beritanya. Misalnya adalah bentuk penyudutan pemerintah dan keberpihakan terhadap pendemo seperti yang dilakukan oleh majalah Forum Keadilan dalam rubrik Forum Utama edisi 29 September – 5 Oktober 2014. Salah satu contohnya yakni penambahan unsur AC dalam kalimat yang digunakan sebagai pembanding antara suasana pendemo dan pemerintah, terlihat adanya keberpihakan pada para mahasiswa dan berdemo dan adanya rasa ketidaksukaan pada anggota legislatif.

Secara keseluruhan, judul-judul dan kalimat-kalimat di majalah Forum dapat memicu emosi sebagian pembaca, contohnya penikmat majalah politik, Sugiharto Purnama. Setelah membaca majalah itu, ia mengaku merasa kesal kepada anggota parlemen, politisi dan pihak-pihak yang telah disebut keburukannya dalam majalah.

Ia mengatakan, judul-judul dan tulisan-tulisan dalam majalah tersebut dapat memprovokasi pembaca.

“Saya setelah membaca berita ini, agak sedikit apa ya. Pandangan saya tentang anggota DPR itu, malah jadi lebih gimana gitu pada mereka, gara-gara berita ini tadi kebanyakan negatifnya. Apa sampai separah itukah anggota DPR sekarang? Gitu. Jadi otomatis saya selaku pembaca jadi terprovokasi dari berita ini. Akhirnya saya jadi kesel lah sama anggota DPR.” – Sugiharto

Sementara itu, menurut Julie Indahrini saat diwawancara, Forum Keadilan hanya bertujuan untuk menginformasikan kepada para pembaca atau masyarakat. Soal kesal atau tidak, menurutnya itu tergantung pada bagaimana latar belakang, pengetahuan, dan kepentingan pembaca.

Di sisi lain, ahli media Adi Marsiela berpendapat bahwa dari sisi kata-kata yang dipilih, Forum Keadilan adalah media yang kurang sehat, karena mengabaikan asas praduga tak bersalah.

“Apabila mempertahankan penggunaan kata-kata seperti koruptor pada seseorang yang status hukumnya masih belum diputuskan bersalah, buat saya ini kurang sehat. Media sejatinya menjadi pengusung wacana atau tema yang penting bagi publik sekaligus harus mampu mengedukasi pembacanya dengan tetap mematuhi kode etik yang berlaku.” – Adi Marsiela

Melalui analisis wacana dan pemakaian bahasanya, bentuk keberpihakan dan penyudutan pada pemerintah dalam teks yang diproduksi oleh wartawan Forum Keadilan dalam penyampaian berita tersebut dapat dideteksi oleh peneliti. Ketiga aspek representasi yaitu representasi pada anak kalimat, representasi pada gabungan anak kalimat, dan representasi pada rangkaian anak kalimat saling berkaitan satu

sama lain untuk mengupas pemberitaan dalam rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan edisi 29 September – 5 Oktober 2014.

4.1.2 Relasi pada Pemberitaan tentang Anggota Legislatif Korupsi dalam rubrik Forum Utama Majalah Forum Keadilan Edisi 29 September – 5 Oktober 2014

Pada sub bab ini, peneliti akan mengamati relasi pemberitaan dalam majalah rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan edisi 29 Spetember – 5 Oktober 2014. Dalam penelitian dari segi relasi, partisipan-partisipan yang ditampilkan dalam teks media saling berhubungan. Di sini media dipandang sebagai suatu arena sosial, di mana semua kelompok, golongan dan khalayak yang ada dalam masyarakat saling berhubungan dan menyampaikan pendapat dan gagasan menurut versi mereka masing-masing.

Ada tiga kategori partisipan utama dalam media menurut Norman Fairclough. Yaitu wartawan, pembaca atau khalayak media dan partisipan publik seperti politisi, pengusaha, tokoh masyarakat, artis, ulama dan sebagainya. Titik perhatian dari analisis hubungan, bukan pada bagaimana partisipan publik tadi ditambahkan dalam media (representasi), tetapi bagaimana pola hubungan di antara ke tiga aktor tadi ditampilkan dalam teks.

“Relasi berkaitan dengan pertanyaan bagaimana partisipan dalam media berhubungan dan ditampilkan dalam teks. Media di sini dipandang sebagai suatu arena sosial, dimana suatu kelompok, golongan, dan khalayak yang ada dalam masyarakat saling berhubungan dan menyampaikan bersi pendapat dan gagasannya.” (Eriyanto, 2008: 300)

Adapun bentuk pernyataan majalah yang berkaitan dengan relasi dalam pemberitaan rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan edisi 29 September – 5 Oktober 2014, peneliti paparkan pada bagan di bawah ini:

Tabel 4.4

Relasi dalam Pemberitaan dalam rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan edisi 29 September – 5 Oktober 2014

No	Kategori Partisipan Utama di Majalah Forum Keadilan	Hasil Temuan Relasi Teks Berita dalam rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan edisi 29 September – 5 Oktober 2014
1	Masyarakat	Ketika ditanya kenapa tidak ada elemen masyarakat yang mempersoalkan longgarnya persyaratan calon kepala daerah dan caleg itu, Musni mengatakan, masyarakat pada umumnya tidak tahu. Dan lebih parahnya lagi, tambah Musni Umar, masyarakat luas selama ini hanya mengambil manfaat ekonomi dari keikutsertaannya dalam menentukan calon kepala daerah dan caleg. “Mereka dapat sembako dan baju,” katanya. (Paragraf 20 dalam berita “Rendah Moral Karena Syarat Longgar, hal 22)
2	Pemerintah	Dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum, pasal 51 menyebutkan 16 syarat untuk menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dari 16 butir pasal 51 itu, tak ada satu pun yang mengatur soal moral. Padahal, moral adalah pangkal dari baik-buruknya seseorang. (Paragraf 2 dalam berita “Rendah Moral Karena Syarat Longgar”, hal 22)
3	Politisi	Selain Lemahnya UU Pemilu, buruknya poses rekrutmen di internal parpol memudahkan caleg bermasalah menjadi anggota dewan. Partai politik dinilai sangat pragmatis dengan merekrut kader-kader parpol dengan mengedepankan faktor kedekatan, loyalitas, mampu memobilisasi massa dan memiliki dukungan finansial yang kuat. “Parpol mengabaikan aspek kualitas, moral, dan integritas caleg,” katanya. (Paragraf 32 dalam

Pemberitaan di rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan edisi 29 September - 5 Oktober 2014 yang diproduksi wartawan Forum Keadilan adalah suatu bentuk relasi yang bertujuan untuk dikabarkan pada khalayak pembaca. Dalam tulisan tersebut tentu ada hubungan-hubungan yang terjadi, dimana hubungan para partisipan tersebut diamati dalam teks.

Partisipan dalam relasi pemberitaan tersebut adalah dari segi masyarakat, dari segi pemerintah, dan dari segi politisi yang dilibatkan dalam pemberitaan mengenai anggota parlemen korupsi tersebut. Pertama peneliti akan membahas mengenai relasi partisipan pertama yaitu masyarakat, seperti yang dipaparkan di bawah ini:

“Ketika ditanya kenapa tidak ada elemen masyarakat yang mempersoalkan longgarnya persyaratan calon kepala daerah dan caleg itu, Musni mengatakan, masyarakat pada umumnya tidak tahu. Dan lebih parahnya lagi, tambah Musni Umar, masyarakat luas selama ini hanya mengambil manfaat ekonomi dari keikutsertaannya dalam menentukan calon kepala daerah dan caleg. “Mereka dapat sembako dan baju,” katanya.” (Paragraf 20 dalam berita “Rendah Moral Karena Syarat Longgar, hal 22)

Di atas adalah penggambaran relasi masyarakat dalam pemberitaan di rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan edisi 29 September – 5 Oktober 2014. Menurut pengamatan peneliti, masyarakat dalam tulisan ini digambarkan bukan masyarakat yang baik, tetapi mereka juga turut mendukung para politisi atau anggota partai politik yang berkampanye dengan cara yang salah.

Masyarakat di dalam teks ini digambarkan sebagai orang yang tidak tahu menahu tentang longgarnya persoalan caleg, dan mereka bahkan mendekati sama

kotornya dengan caleg tersebut karena menerima “suap” berupa uang atau barang ekonomi lainnya.

Meski wartawan Forum Keadilan tampak cover both sides dengan memaparkan keburukan yang biasa dilakukan oleh para warga, hal itu tidak sebanding dengan banyaknya celaan yang dituliskan Forum Keadilan pada pemerintah dalam tulisan-tulisan lainnya pada berita ini. Selain itu, tulisan di atas bukan ungkapan yang ditulis oleh wartawan Forum Keadilan, melainkan sebuah kutipan yang diungkapkan oleh seorang Sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Dr. Musni Umar.

Di sisi lain, pihak Forum Keadilan juga bersikap sepihak kepada pendemo yang juga bagian dari masyarakat, seperti yang dibahas pada sub judul representasi. Dan keberpihakan majalah Forum Keadilan kepada masyarakat jauh lebih menonjol daripada kutipan Musni Umar tersebut.

Dari situ peneliti simpulkan bahwa Forum Keadilan membela masyarakat karena Forum Keadilan tidak banyak menjelek-jelekan masyarakat seperti saat ia menulis banyak kejelekan pemerintah khususnya DPR, DPRD, serta politisi. Selain itu, isi berita secara keseluruhan juga terlihat berpihak kepada rakyat.

Ahli media Adi Marsiela pun menyatakan hal yang sama. Ia mengungkapkan, Forum Keadilan dalam berita ini membela kepada masyarakat, dengan cara menyadarkan publik tentang kondisi pemerintahan sekarang ini.

“Forum Keadilan tentu memiliki idealisme tertentu. Dari berita di rubrik Forum Utama, majalah Forum berada bersama rakyat. Kritis dengan cara

menyadarkan publik soal kondisi dewan serta politik di Indonesia sekarang ini.” – Adi Marsiela

Selanjutnya, peneliti menemukan potongan teks yang ada hubungannya dengan relasi dengan pihak pemerintah. Di bawah ini adalah potongan tulisan relasi pemerintah dalam pemberitaan di rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan edisi 29 September – 5 Oktober 2014:

“Dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum, pasal 51 menyebutkan 16 syarat untuk menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dari 16 butir pasal 51 itu, tak ada satu pun yang mengatur soal moral. Padahal, moral adalah pangkal dari baik-buruknya seseorang.” (Paragraf 2 dalam berita “Rendah Moral Karena Syarat Longgar”, hal 22)

Berdasarkan tulisan yang diproduksi oleh wartawan Forum Keadilan di atas, dapat dibilang bahwa teks tersebut adalah bentuk dari relasi. Karena teks tersebut sangat berkaitan dengan hasil penemuan pertama mengenai masyarakat, di mana pernyataan pemerintah ini adalah akar dari banyaknya masyarakat yang menerima imbalan dari pihak politisi.

Dalam teks tersebut, wartawan Forum Keadilan menuliskan pernyataan dari pihak pemerintah atau disini adalah DPR yang mengesahkan undang-undang tersebut. Dikatakannya bahwa pemerintah memiliki peraturan undang-undang mengenai pemilihan umum, namun tak satu pun dari pasal-pasal di undang-undang tersebut yang mensyaratkan tentang moral. Hal yang sama juga terjadi pada undang-undang yang baru disahkan DPR belum lama itu.

Di sini peneliti dapat melihat bahwa pihak Forum Keadilan bersikap menyudutkan pemerintah, karena akibat pemerintah yang mengeluarkan undang-

undang atau syarat menjadi caleg yang tidak ketat, hal itu akan menyebabkan banyaknya anggota-anggota bermasalah yang akan mendaftarkan diri menjadi calon legislatif.

Senada dengan yang penulis ungkapkan, penikmat majalah politik Sugiharto pun merasa tulisan dalam rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan kurang berimbang, karena terlalu menyudurkan DPR dengan menuliskan banyak sekali kesalahan DPR.

“Saya rasa, lebih baiknya ketika menulis sebuah berita, wartawan itu harus berimbang. Jangan terlalu pro ke kiri, atau jangan terlalu pro ke kanan. Kalau saya baca beberapa berita di majalah ini, saya lihat tulisannya terlalu banyak sentimen-sentimen negatifnya kepada DPR dan pemerintah. Nah, akhirnya kan, tidak ada keberimbangan itu, otomatis orang-orang hanya menilai, ya DPR buruk. Sisi baik DPR itu seperti apa sih. Nah, sebaiknya kalau membuat berita itu ya harus berimbang.” – Sugiharto

Demikian pula dengan pendapat Hikmat kusumaningrat dalam buku “Jurnalisik Teori dan Praktik”. Menurutnya, pemberitaan itu harus objektif dengan memuat fakta dari kedua belah pihak. Meskipun begitu, hal ini terkadang sulit untuk dilakukan, karena berkaitan dengan latar belakang wartawan dan tujuan media itu sendiri.

“Selain harus memiliki ketepatan (akurasi) dan kecepatan dalam bekerja, wartawan dituntut untuk bekerja objektif dalam menulis. Dengan sikap objektifnya, berita yang ia buat pun akan objektif, artinya berita yang dibuat itu selaras dengan kenyataan, tidak berat sebelah, bebas dari prasangka. Sebuah *depth-reporting* (pemberitaan mendalam) maupun *investigative reporting* (pemberitaan investigasi) haruslah objektif, meskipun boleh memiliki suatu fokus pandangan, *point of view*. Memang untuk bersikap objektif 100% sangat sulit, hampir tidak mungkin, karena latar belakang seorang wartawan acapkali mewarnai hasil karyanya.” (Kusumaningrat, 2005: 54).

Berikutnya peneliti menemukan potongan tulisan dalam rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan yang berkaitan dengan relasi dengan politisi. Berikut ini adalah pernyataan tersebut:

“Selain Lemahnya UU Pemilu, buruknya poses rekrutmen di internal parpol memudahkan caleg bermasalah menjadi anggota dewan. Partai politik dinilai sangat pragmatis dengan merekrut kader-kader parpol dengan mengedepankan faktor kedekatan, loyalitas, mampu memobilisasi massa dan memiliki dukungan finansial yang kuat. “Parpol mengabaikan aspek kualitas, moral, dan integritas caleg,” katanya.” (Paragraf 32 dalam berita “Buruk Rupa Wajah Parlemen”, hal. 15)

Dalam pernyataan atau teks di atas, politisi dalam artian pihak-pihak partai politik digambarkan oleh wartawan Forum Keadilan sebagai salah satu pihak yang mendukung menjamurnya anggota-anggota legislatif bermasalah. Selain itu di tulisan tersebut, wartawan juga menyebut bahwa partai politik bersikap pragmatis. Mereka bersikap seperti itu karena lebih mementingkan sisi kepraktisan daripada manfaat. Selain itu, wartawan Forum Keadilan menambahkan pernyataan pelengkap lain, seperti bahwa mereka mengedepankan nepotisme dan hanya memilih anggota yang berduit.

Dari sini sudah terlihat jelas bahwa wartawan Forum Keadilan bersikap menyudutkan partai-partai politik atau politisi, sama seperti ia menyudutkan pemerintah. Wartawan Forum Keadilan seakan ingin memberi gambaran pada pembaca bahwa partai politik di Indonesia ini banyak yang *bobrok*. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya kejelekan-kejelekan politisi yang banyak ditulis di kalimat tersebut.

Penikmat majalah politik Sugiharto penulis tanya tentang perbandingan dengan majalah sejenis seperti majalah Tempo dan Gatra. Menurutnya, Tempo dan Gatra terlihat lebih halus dan seimbang dalam pemberitaannya.

“Kalau saya baca, Tempo sama Gatra agak jauh lebih *soft* ya mereka menulisnya. Jadi mereka ngambil dari banyak sudut pandang, terutama untuk laporan utama mereka. Ketika beberapa paragrafnya sudah mulai menggiring ke kiri, nanti paragraf selanjutnya mereka akan menggiring ke kanan lagi.” – Sugiharto

Saat penulis melakukan wawancara pada redaktur pelaksana Forum Keadilan Julie Indahrini, ia mengatakan bahwa Forum Keadilan menulis “Buruk” dalam judul mereka, karena mereka punya data. Selain itu, judul tersebut adalah nilai jual bagi majalah Forum. Karena judul adalah hal pertama yang menonjol saat dilihat pembaca, maka kesan pertama itu penting agar pembaca tertarik untuk membeli majalah Forum Keadilan.

Hal tersebut bisa dibilang sejalan dengan teori ekonomi-politik media menyebutkan bahwa media memusatkan lebih banyak perhatian kepada struktur ekonomi daripada muatan atau isi ideologis media. Teori ini memfokuskan ideologi medianya kepada kekuatan ekonomi dan mengarahkan perhatian penelitian pada analisis empiris terhadap struktur kepemilikan dan mekanisme kerja kekuatan pasar media (McQuail, 1987: 63). Namun Julie Indahrini menegaskan, bahwa meski selain bertujuan untuk berjualan, namun membeli majalah itu juga otomatis akan mengedukasi masyarakat.

“Tujuannya tetap jualan *dong*, itu kan jualan di perusahaan. Tetapi apa yang disampaikan itu kan otomatis mengedukasi. Kita membuat judul agar

masyarakat tertarik untuk membaca. Ketika dia ingin membaca, ya dia harus beli *dong*.” – Julie Indahrini

Hal itu senada dengan ungkapan ahli media Adi Marsiela, yakni ketika ia sependapat dengan penulis bahwa judul seperti itu dibuat agar meningkatkan angka penjualan dan rating. Selain itu, ia juga menganggap bahwa judul di majalah Forum Keadilan bisa dikatakan hiperbola, namun khusus pada judul dalam tulisan yang lain, yakni “Membajak Demokrasi”.

“Menurut saya judul Membajak Demokrasi tidaklah provokatif. Kalau mau disebut hiperbola bisa jadi, tapi tengok tujuan penulis menempatkan judul tersebut, agar dibaca. Persoalan judul itu dianggap menyindir, saya kira sah-sah saja, karena memang benar faktanya para calon wakil rakyat itu terlibat kasus hukum (baca: korupsi).” – Adi Marsiela

Sementara itu, penikmat majalah politik Sugiharto Purnama saat diwawancara oleh penulis mengakui, bahwa judul “Buruk Rupa Wajah Parlemen” tersebut sangat provokatif, dan membuat ia penasaran untuk membaca isinya. Maka bisa dikatakan bahwa Majalah Forum Keadilan telah berhasil menarik pembaca agar membaca majalah mereka lebih lanjut.

Relasi-relasi yang ditampilkan dalam teks pemberitaan di rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan edisi 29 September – 5 Oktober 2014 tersebut adalah salah satu bentuk rekonstruksi berita yang dilakukan oleh pihak wartawan maupun redaktur Forum Keadilan untuk mencapai keinginan dan tujuan media itu tersendiri.

Tulisan dalam majalah tersebut hampir semuanya merupakan pernyataan mengenai kejelekan-kejelekan dari semua pihak yang berhubungan, mulai dari pemerintah, politisi, maupun masyarakat. Pemerintah dinilai terlalu longgar dalam

memberi syarat-syarat apa saja untuk mencalonkan menjadi caleg, politisi dinilai pragmatis dengan merekrut anggota yang memiliki faktor kedekatan dan finansial, serta masyarakat dinilai tidak tahu menahu dan hanya mengambil kepentingan ekonomi seperti uang dan sembako saat dituntut untuk memilih salah satu calon legislatif. Meski demikian, sisi negatif masyarakat hanya dibahas sebagian kecil.

Analisis tentang konstruksi hubungan ini, dalam media sangat penting dan signifikan, terutama jika analisis ini digabungkan dengan konteks sosial atau masyarakat. Hal itu disebabkan pengaruh unik dari posisi relasi-relasi yang ditampilkan oleh wartawan Forum Keadilan dalam kasus tersebut, yang menunjukkan konteks yang cenderung menyudutkan kepada berbagai pihak, baik pemerintah maupun politisi. Selain itu analisis hubungan juga penting untuk melihat bagaimana khalayak ditempatkan dalam pemberitaan, bagaimana pola hubungan antara wartawan dan pemerintah, atau antara wartawan dan politisi tersebut dikomunikasikan kepada khalayak. Atau dengan kata lain, bagaimana teks tersebut membangun relasi dengan khalayak atau partisipan lain akan dapat diketahui.

4.1.3 Identitas pada Pemberitaan tentang Anggota Legislatif Korupsi dalam rubrik Forum Utama Majalah Forum Keadilan Edisi 29 September – 5 Oktober 2014

Dalam aspek identitas, hal yang akan diamati adalah bagaimana identitas penulis atau wartawan dikonstruksi di dalam teks. Selain itu, penulis juga akan mengamati bagaimana identitas majalah Forum Keadilan secara keseluruhan. Menurut Fairclough, yang menarik adalah bagaimana wartawan menempatkan diri

dan mengidentifikasi diri dengan masalah atau kelompok sosial yang terlibat di pemberitaannya. Di sini dapat diketahui bahwa wartawan masuk kategori yang mana. Apakah wartawan mengideentifikasikan dirinya sebagai bagian dari masyarakat, atau mengidentifikasi dirinya secara mandiri.

Berikut ini adalah beberapa potong teks pada rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan edisi 29 September - 5 Oktober 2014 yang berkaitan atau menunjukkan bagaimana identitas wartawan Forum Keadilan dalam pemberitaan di teks tersebut.

Tabel 4.5

Identitas wartawan dalam pemberitaan di rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan edisi 29 September – 5 Oktober 2014

No	Teks Berita yang Berkaitan dengan Identitas Wartawan
1	Seakan tidak memperdulikan para mahasiswa yang berpanas-panasan di luar, dalam ruang berpendingin di Gedung Merdeka, 100 anggota DPRD Jawa Barat hari itu dilantik. (Paragraf 3 dalam berita “Buruk Rupa Wajah Parlemen, hal 12)
2	Ketika ditanya kenapa tidak ada elemen masyarakat yang mempersoalkan longgarnya persyaratan calon kepala daerah dan caleg itu, Musni mengatakan, masyarakat pada umumnya tidak tahu. Dan lebih parahnya lagi, tambah Musni Umar, masyarakat luas selama ini hanya mengambil manfaat ekonomi dari keikutsertaannya dalam menentukan calon kepala daerah dan caleg. “Mereka dapat sembako dan baju,” katanya. (Paragraf 20 dalam berita “Rendah Moral Karena Syarat Longgar, hal 22)

Dalam suatu teks berita, wartawan dapat menempatkan diri bahwa ia akan berada di pihak yang mana. Apakah mandiri, berpihak pada masyarakat, atau justru

berpihak kepada pemerintah dan politisi. Salah satu contoh hasil temuan peneliti yakni potongan kalimat yang menunjukkan identitas wartawan, yakni seperti di bawah ini:

“Seakan tidak memperdulikan para mahasiswa yang berpanas-panasan di luar, dalam ruang berpendingin di Gedung Merdeka, 100 anggota DPRD Jawa Barat hari itu dilantik.” (Paragraf 3 dalam berita “Buruk Rupa Wajah Parlemen, hal 12)

Dalam kalimat pada berita “Buruk Rupa Wajah Parlemen” tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa wartawan mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari para pendemo atau mahasiswa tersebut, atau bisa dikatakan sebagai masyarakat. Pasalnya, ketika wartawan Forum Keadilan menambahkan unsur ruangan pendingin dan membuat kalimat tersebut menjadi kontras, ia seakan simpati dengan para mahasiswa yang berunjuk rasa di pertigaan Jalan Asia Afrika tersebut.

Sebenarnya ruangan pendingin itu tidak ditambahkan juga tidak apa-apa karena bukan informasi penting, namun wartawan Forum Keadilan menambakkannya, dimana hal itu menunjukkan identifikasi wartawan yang cenderung satu sudut dengan para pendemo. Selain itu, seperti dipaparkan dalam sub bab representasi, kalimat-kalimat lain di majalah itu banyak yang melakukan penyindiran atau penyudutan pada pihak pemerintah dan politisi, yang semakin mempertegas identifikasi wartawan dalam kalimat di atas.

Namun, di sisi lain ada pula contoh kalimat yang tak kalah menarik dengan pemaparan di atas, yakni seperti dijelaskan di bawah ini.

“Ketika ditanya kenapa tidak ada elemen masyarakat yang mempersoalkan longgarnya persyaratan calon kepala daerah dan caleg itu, Musni

mengatakan, masyarakat pada umumnya tidak tahu. Dan lebih parahnya lagi, tambah Musni Umar, masyarakat luas selama ini hanya mengambil manfaat ekonomi dari keikutsertaannya dalam menentukan calon kepala daerah dan caleg. “Mereka dapat sembako dan baju,” katanya.” (Paragraf 20 dalam berita “Rendah Moral Karena Syarat Longgar, hal 22)

Kalimat di atas adalah potongan teks dalam berita “Rendah Moral Karena Syarat Longgar”, yang merupakan salah satu judul dalam rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan edisi 29 September -5 Oktober 2014. Berbeda dengan kalimat sebelumnya, pada kalimat ini peneliti sempat beranggapan bahwa wartawan Forum Keadilan mengidentifikasi diri secara mandiri. Hal itu terlihat dari kalimatnya yang lebih *soft*, yaitu sama sekali tidak diberi penambahan kata-kata, atau “bumbu-bumbu” lainnya. Wartawan Forum Keadilan hanya memaparkan transkrip wawancara yang telah dilakukannya pada Sosiolog Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Dr. Musni Umar.

Namun tidak sampai disitu, peneliti melihat adanya perbedaan pernyataan tersebut dengan pernyataan serupa mengenai pemerintah. Jika keburukan pemerintah dipaparkan dalam majalah ini, biasanya wartawan Forum Keadilan akan menambah bumbu-bumbu agar lebih mendramatisir untuk dibaca. Namun ketika membahas keburukan masyarakat, majalah Forum tidak melakukannya. Jadi, peneliti simpulkan bahwa wartawan Forum Keadilan itu sebenarnya mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari masyarakat. Karena keburukan masyarakat yang dipaparkan, ia mengurangi pembahasan tersebut se-sedikit mungkin, dan lebih berfokus pada keburukan pemerintah dan politisi.

Selain identitas dari wartawan, peneliti juga menemukan identitas khas dari majalah Forum Keadilan, terutama dari cara mereka mengemas berita. Hal itu bisa dilihat dari judul yang dipilih, serta ciri khas dalam penulisan teks dalam majalah Forum Keadilan. Contoh teks-teks tersebut adalah seperti di bawah ini:

Tabel 4.6

Identitas majalah menurut pemberitaan di rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan edisi 29 September – 5 Oktober 2014

No	Teks Berita yang Berkaitan dengan Identitas Majalah
1	Buruk Rupa Wajah Parlemen (Judul salah satu berita, hal 12)
2	Dengan kata lain, UU Pilkada yang baru disahkan itu tak mempersalahkan, calon tersebut pernah membunuh, memperkosa, korupsi, atau tindak pidana lainnya. Yang penting sudah pernah menjalani hukuman tersebut. selanjutnya, seperti iklan rokok 'go ahead', pencalonan bisa dilanjutkan. (Paragraf 5 dalam berita "Rendah Moral Karena Syarat Longgar, hal 21)
3	Dua Kelompok Massa mahasiswa tersebut bukan untuk menyemarakkan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat yang diselenggarakan hari itu. Namun menggelar aksi demonstrasi sebagai unjuk rasa keprihatinan atas kualitas anggota dewan yang mengaku mewakili rakyat. (Paragraf 1 dalam berita Buruk Rupa Wajah Parlemen, hal 12)

Majalah Forum Keadilan seringkali menggunakan judul dengan menggunakan kata-kata yang tajam dan provokatif. Contohnya adalah "Buruk Rupa Wajah Parlemen", yang menggambarkan seperti anggota-anggota dewan yang bermuka buruk. Atau judul "Membajak Demokrasi" yang digambarkan seperti kemerdekaan

Indonesia dikebiri oleh para parlemen. Dalam menuliskan judul, ciri khas atau identitas mereka adalah sering menggunakan kata-kata yang gamblang.

Dalam majalahnya, Forum Keadilan jarang menggunakan kata-kata metafora atau kiasan untuk mempermanis judul. Justru kata-kata yang gamblang, menurut peneliti dapat lebih membakar emosi pembaca, dibandingkan kalimat kiasan yang membuat pembaca berpikir sejenak. Menurut redaktur pelaksana Forum Keadilan Julie Indahrini, judul dan tulisan seperti itu adalah nilai jual bagi majalah Forum, yang merupakan salah satu unsur yang membuat pembaca akan tertarik untuk memilih majalah Forum Keadilan sebagai bahan bacaan.

“Ya itulah seperti tagline kita, tegas dan berani. Jadi kita gak mau berputar-putar memilih judul, karena kan fungsi judul itu supaya orang membaca lebih dalam. Kita ingin langsung menggambarkan bahwa inilah kondisi yang terjadi lewat tulisan yang kita sampaikan, ini lho intinya.” – Julie Indahrini

Selain itu, mereka memiliki ciri khas lain dalam penyajian berita, yakni sering menggunakan kalimat yang menyindir atau memojokkan pihak-pihak yang dianggap bersalah, dalam hal ini pihak yang sering disindir adalah DPR dan politisi. Misalnya seperti dalam kalimat di bawah ini:

“Dengan kata lain, UU Pilkada yang baru disahkan itu tak mempersalahkan, calon tersebut pernah membunuh, memperkosa, korupsi, atau tindak pidana lainnya. Yang penting sudah pernah menjalani hukuman tersebut. selanjutnya, seperti iklan rokok ‘go ahead’, pencalonan bisa dilanjutkan.” (Paragraf 5 dalam berita “Rendah Moral Karena Syarat Longgar, hal 21)

Dalam kalimat di atas, mereka memasukkan unsur membunuh, memperkosa, narkoba dalam penyontohan kasus kriminal yang memungkinkan dapat dilakukan

oleh anggota yang ingin mendaftar menjadi calon legislatif. Ini tentu saja bentuk sindiran yang tajam, karena kejahatan-kejahatan tersebut adalah kasus yang tidak ringan. Di sisi lain, Forum Keadilan juga menyisipkan sindiran dalam bentuk candaan, yakni menambahkan unsur iklan rokok ‘*go ahead*’, yang dimaksudkan bagi para caleg kriminal. Selain contoh tadi, masih ada beberapa sindiran lain yang ditulis dalam teks berita di majalah Forum Keadilan ini.

Menurut ahli media Adi Marsiela, Forum Keadilan memiliki idealisme tertentu, yang mana pemberitaannya berpihak kepada masyarakat.

“Tentu Forum memiliki idealisme tertentu. Dari berita di fokus utama, Forum berada bersama rakyat. Kritis dengan cara menyadarkan publik soal kondisi dewan serta politik di Indonesia sekarang ini.” – Adi Marsiela

Selain itu ia juga berpendapat, bahwa secara umum, Forum Keadilan adalah media *mainstream* yang skalanya nasional dan berfokus pada isu-isu hukum. Hal tersebut juga merupakan identitas dari majalah Forum Keadilan.

Identitas berita dalam rubrik Forum Utama dalam majalah ini akan berkaitan dengan karakteristik dan penonjolan yang hendak ditampilkan kepada khalayak pembacanya. Tujuannya, untuk memperlihatkan pembedaan dari media-media yang lain. Selain itu, identitas wartawan yang ditampilkan dalam berita juga dapat menunjukkan ke arah mana berita itu akan mengalir. Identitas tersebut akan menentukan bagaimana teks itu akan dibuat, bagaimana pertanyaan akan diajukan kepada narasumber, dan bagaimana bahan-bahan itu ditulis ke dalam teks berita. Identifikasi ini akan menentukan bagaimana wacana yang ingin ditampilkan pada khalayak.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian dari majalah Forum Keadilan terkait unsur representasi, relasi, dan identitas sudah dijelaskan pada sub-bab di atas. Dalam sub-bab ini peneliti akan menjelaskan secara detail mengenai apa saja keterkaitan antara hasil penelitian tersebut dengan literatur yang dikumpulkan oleh peneliti. Hal-hal mengenai karakteristik komunikasi massa dan majalah, jenis-jenis feature, gaya penulisan berita, dan kepentingan media akan didalami pada bab ini.

Majalah Forum Keadilan adalah salah satu jenis komunikasi massa, yang bersifat satu arah dan serempak. Pembaca tidak akan segera memberi reaksi terhadap isi dalam majalah ini, karena umpan balik tertunda adalah salah satu ciri dalam media massa, khususnya media cetak. Majalah ini memiliki empat fungsi dari lima fungsi yang dijelaskan Dominick (Ardianto, 2007: 14), yakni *Surveillance*, *Interpretation*, *Linkage*, dan *Transmission of Values*.

Pertama *Surveillance*, yaitu fungsi peringatan. Majalah Forum telah menjalankan fungsi ini, karena masyarakat perlu diberitahu bahwa anggota parlemen yang mereka pilih adalah koruptor. Jika masyarakat tahu bahwa pilihannya adalah salah, mereka akan mengambil pengalaman dan akan berpikir dua kali untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Selain itu, para parlemen bermasalah yang disebut akan malu dan hal ini dapat membuat dampak positif bagi mental mereka.

Interpretation, yakni fungsi penafsiran. Majalah Forum tentu memiliki fungsi ini, bahkan kalimat yang terdapat fungsi ini banyak ditemui dalam majalah. Mereka melakukan penafsiran dalam tulisannya karena gaya bahasa seperti itu akan lebih

menarik. Pembaca dapat terhanyut jika majalah Forum menjelaskan sikap acuh para anggota parlemen yang membiarkan para pendemo berpanas-panasan di luar, daripada memberitakan tentang gagahnya para mahasiswa yang berdemo. Selain dikarenakan memihak para pendemo, majalah Forum menggunakan gaya bahasa ini agar menarik simpati para pembaca pada para pendemo.

Linkage, yaitu fungsi penyatuan. Pemberitaan dari majalah ini akan menyatukan beberapa kelompok masyarakat yang memiliki minat yang sama, yakni dari para pembaca yang notabene para penegak hukum seperti kalangan pengacara dan politisi. Selain itu, majalah ini juga diminati kaum mahasiswa. Meskipun para pembaca tak bisa saling berkomunikasi melalui majalah karena ini adalah media cetak, namun mereka dapat membuat forum atau komunitas sendiri sesama penyuka berita politik, yang akan menyatukan mereka.

Yang keempat adalah *Transmission of Values*, atau penanaman nilai. Majalah Forum menanamkan pada para pembaca, bahwa parlemen itu adalah kumpulan sampah masyarakat yang berhasil naik tahta, disebabkan ketidak becusan DPR dalam mengelola regulasi. Nilai-nilai itu dapat membuat masyarakat memandang sebelah mata pada DPR, dan menyimpan rasa benci terhadap parlemen periode 2014-2019. Hal ini bisa menyebabkan adanya efek-efek lanjutan, bisa berupa munculnya demo-demo susulan, atau aktivitas kreatif masyarakat dalam menentang para parlemen.

Ada satu lagi fungsi komunikasi massa yaitu *Entertainment* atau hiburan. Namun majalah tipe seperti ini tidak menyajikan hiburan seperti media massa tertentu lainnya. Forum Keadilan hanya memberikan info tentang permasalahan korupsi,

dimana yang akan terhibur dengan berita seperti ini adalah kaum penggemar berita politik atau golongan orang yang terlibat dalam masalah yang diberitakan, yakni orang-orang yang memiliki faktor kedekatan dengan berita yang diangkat.

Media cetak berupa majalah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan koran, yaitu pembahasan yang lebih mendalam dan waktu terbit yang lebih panjang. Majalah Forum Keadilan memiliki karakteristik yang sesuai dengan pendapat Soeseno (1993:9).

Menurut Soeseno, majalah mempekerjakan banyak orang, namun hanya membutuhkan modal kecil bagi bisnis majalah yang anggarannya kecil. Forum Keadilan termasuk ke dalamnya, karena anggaran yang mereka keluarkan tidak sebanyak media mainstream lainnya. Kuatnya persaingan media di era reformasi adalah salah satu alasan majalah Forum kalah populer dengan majalah politik lain seperti Gatra dan Tempo. Majalah Forum memang tidak sedalam Tempo ketika membahas suatu permasalahan, karena SDM dan dana mereka yang terbatas.

Soeseno juga berpendapat bahwa majalah mempunyai fleksibilitas dan variasi lebih tinggi. Namun, pada praktiknya, majalah Forum tidak melakukan banyak variasi dari majalah-majalah terbitan terdahulu. Majalah ini mempunyai layout yang tak terlalu menyegarkan mata. Hal ini lagi-lagi dikarenakan masalah dana, yang tentu akan membuat harga majalah menjadi lebih tinggi bila dibuat full-color. Padahal, di era digital seperti sekarang warna adalah hal wajib, karena dengan internet masyarakat bisa mengakses berbagai konten yang bervariasi. Jika majalah Forum tak melakukan perubahan, ada kemungkinan majalah mereka akan kian sepi peminat.

Ciri lain majalah yaitu pembahasan masalah yang lebih mendalam. Majalah Forum memang membahas majalah dengan mendalam, namun hal yang mereka bahas cenderung monoton. Untuk rubrik yang menghabiskan sebelas halaman penuh, seharusnya konten yang dibahas lebih bervariasi agar makin informatif dan makin mencerdaskan pembaca.

Majalah Forum juga merupakan majalah yang berfokus pada isu-isu hukum, maka sasaran pembacanya juga lebih spesifik, yakni kalangan orang hukum. Berbeda dengan majalah mainstream yang sifatnya lebih ke umum. Karena hal inilah majalah Forum mempunyai suatu pasar tersendiri yang berbeda dengan majalah mainstream, yang membuat majalah Forum tetap bertahan hingga kini.

Majalah ini terbit berkala setiap minggu, namun topik pembahasannya selalu berbeda setiap edisi. Apapun tema permasalahan yang mereka angkat tiap minggunya, judul di cover majalah selalu menggunakan kalimat yang sarkastik. Alasannya tentu karena pembaca selalu tertarik dengan judul depan majalah, yang membuat ia memilih majalah itu daripada majalah lain yang berjejer.

Selain itu, majalah mempunyai banyak jenis yang bervariasi. Santana (2005: 93) memaparkan bahwa ada lebih dari 18 jenis majalah pada saat ini. Dari mulai majalah umum, majalah berita, majalah olahraga, hingga majalah yang membahas hal yang sangat spesifik seperti majalah tanaman atau hobi-hobi tertentu.

Dilihat dari pendapat Santana, majalah Forum Keadilan paling cocok jika dimasukkan ke dalam kategori majalah berita. Hal ini dapat dilihat dari konten majalah itu yang banyak membahas mengenai dilema perpolitikan pada kalangan elit

di Indonesia. Namun, lebih spesifik lagi jika majalah ini masuk dalam kategori majalah hukum atau majalah politik-hukum. Pasalnya majalah Forum banyak membahas kasus-kasus politik dari sudut pandang hukum. Berbeda dengan majalah politik lain yang cenderung membahas kasus dari sudut pandang yang lebih umum.

Tulisan-tulisan dalam majalah Forum Keadilan adalah tulisan feature, bukan straight news. Hal ini dikarenakan feature tidak mengedepankan kecepatan, tapi mengedepankan seni ketika membacanya. Majalah Forum sendiri adalah majalah mingguan yang tidak seaktual koran yang terbit setiap harinya. Sebagai contoh, tulisan di majalah Forum banyak yang menyindir parlemen dan politisi. Selain menarik pembaca, majalah Forum tentu ingin pembaca melahap habis seluruh konten dalam majalah, yang mereka desain sedemikian rupa dari pemilihan kata-kata, pemilihan kalimat, dan rangkaian kalimatnya.

Jika melihat dari jenis-jenis feature dalam kusumaningrat (2005: 223), maka rubrik Forum Utama majalah Forum Keadilan yang diteliti termasuk dalam jenis berita feature dan berita berwarna. Berita feature dalam kusumaningrat adalah berita yang di-featurekan. Berita ini tergantung dengan peristiwa yang sedang hangat, namun disajikan dengan lebih menekankan segi human-interest. Hal ini pas sekali dengan berita di majalah Forum yang sangat memojokkan parlemen, dan menyebabkan ketertarikan pembaca untuk menyelami majalah itu lebih lanjut. Selain itu, rubrik itu juga termasuk ke dalam berita berwarna, karena berita di majalah Forum Keadilan tersebut menyeret pembaca untuk merasakan emosi ketika membacanya.

Rubrik ini tidak termasuk “berita human interest sederhana” dan “sidebars” (berita hari kedua), karena kedua jenis berita itu lebih cenderung ke berita singkat. Selain itu juga tidak termasuk dalam “berita latarbelakang”, karena isu yang dibahas dalam berita ini adalah isu yang menarik, walaupun tanpa adanya isu lain yang melatarbelakangi. Majalah Forum selalu mengangkat isu yang baru setiap minggu, dan tidak mendalami lagi permasalahan yang sudah dibahas di edisi majalah sebelumnya. Pembaca pun tentu menginginkan konten yang fresh dalam setiap edisi majalah, karena majalah itu sudah membahas suatu masalah secara mendetail.

Selain Kusumaningrat, Santana (2005: 76) juga mengutarakan kategori-kategori feature. Santana memberikan cukup banyak contoh yaitu 14 kategori feature, semisal feature kedokteran, feature profil, feature *how-to*, dan sebagainya. Namun kategori itu sangat spesifik, sehingga hanya ada satu kategori yang “agak” pas dengan majalah Forum Keadilan, yaitu kategori feature *The Overview Story*.

The Overview Story, menurut Santana yaitu kisah yang biasanya bersifat emotif yang membahas fenomena aktual di masyarakat. Topik yang dibahas oleh majalah Forum bersifat aktual meskipun tak terlalu baru, yakni pembahasan tentang pelantikan parlemen yang dilakukan tanggal 1 September 2014, sedangkan majalahnya sendiri terbit pada 29 September 2014. Meskipun selang sebulan, namun tema itu masih cukup hangat untuk dibicarakan, karena ini adalah isu besar, dan para anggota parlemen itu akan tetap bertahan disitu hingga tahun 2019. Tema ini juga cukup emotif, karena dapat menimbulkan emosi marah sebagian pembaca, atau emosi lain, tergantung pada latar belakang pembaca.

Namun, jika ingin lebih spesifik, tulisan di majalah Forum Keadilan lebih tepat apabila dimasukkan ke dalam kategori feature politik-hukum, karena majalah ini membahas berbagai fenomena politik di Indonesia dengan sudut pandang hukum. Santana tak mencantumkan itu di bukunya karena memang ini adalah kategori yang sangat spesifik.

Tiap media yang mapan biasanya sudah memiliki gaya penulisan tertentu, termasuk majalah Forum Keadilan. Seperti yang telah dibahas dalam hasil penelitian, secara garis besar majalah Forum Keadilan memiliki ciri khas, yaitu gaya bahasa yang tajam dan mendramatisir. Gaya penulisan berita bisa dilihat dari lead berita dan bagian tubuh berita. Jenis lead berita ada banyak, bisa berupa lead ringkasan, lead humor, lead bercerita, lead kutipan, dan lain-lain (Santana, 2005: 148). Forum Keadilan adalah majalah yang menarik, karena dalam rubrik yang diteliti, mereka selalu menggunakan lead yang berbeda.

Dalam berita mukadimah “Membajak Demokrasi” (hal. 11), lead yang digunakan adalah lead deskriptif. Berikut kutipannya:

“Indonesian Corruption Watch (ICW) melansir sedikitnya 48 anggota legislatif hasil pemilihan umum yang diselenggarakan April 2014 silam terlibat kasus korupsi. mulai dari masih berstatus tersangka sebuah perkara yang diusut penegak hukum, sedang diadili di pengadilan tindak pidana korupsi sampai dengan resmi menjadi terpidana korupsi alias koruptor.”

Lead ini adalah lead yang cenderung biasa-biasa saja, hanya menggambarkan keadaan para koruptor yang sudah terjadi dan tidak terlalu “menonjol” bagi pembaca. Berita ini berbeda karena ini adalah berita mukadimah, bukan berita inti. Namun dalam berita lain, lead mereka cenderung selalu sarkastik. Gaya penulisan yang

terkadang menonjok dan terkadang datar, menunjukkan ketidakkonsistenan majalah Forum dalam gaya penulisan yang mereka gunakan.

Selanjutnya, Forum Keadilan menggunakan lead pertanyaan mengejutkan dalam berita “Buruk Rupa Wajah Parlemen” (hal. 12). Berikut kutipannya:

“Sebanyak 48 Anggota Legislatif periode 2014-2019 terlibat kasus korupsi. Jumlah ini meningkat drastis dibanding periode 2009-2014 yang hanya enam orang. Akibat buruknya rekrutmen atau dampak politik pragmatis partai?”

Lead tersebut cukup mengejutkan, karena Forum memaparkan bahwa periode ini jumlah koruptor pada parlemen naik hingga delapan kali lipat dari periode sebelumnya, dan mengakhirinya dengan pertanyaan perihal penyebab hal tersebut. Hal ini dapat membuat pembaca tertegun karena bahasannya memang menarik sebagai berita utama. Lead di berita utama majalah Forum harus menarik, sebab hal tersebut akan membentuk kesan pertama yang baik bagi pembaca.

Untuk berita “Yang Cacat Hukum Yang Dipilih” (hal 17), majalah Forum menggunakan lead yang lain lagi, yakni lead menuding langsung. Bisa dilihat dalam kutipan berikut ini:

“Politik uang telah mematikan akal sehat pemilih. Mereka tak perduli calon kepala daerah itu bersih atau tidak dalam kasus hukum. Alhasil, kepala daerah yang tersangkut kasus hukum pun semakin bertambah.”

Lead diatas dikategorikan ke dalam lead menuding langsung, karena wartawan Forum tampak menuding langsung pada para pemilih, bahwa mereka tak perduli calon kepala daerah itu bersih atau tidak. Gaya penulisan yang tajam seperti ini adalah ciri khas dari majalah Forum Keadilan. Dalam beberapa kalimat lain

majalah Forum banyak menggunakan gaya seperti ini, agar pembaca tetap tertarik untuk membacanya sampai habis.

Untuk berita terakhir, yaitu “Rendah Moral Karena Syarat Longgar” (hal 20), berita ini menggunakan lead humor. Berikut kutipannya:

“Dalam memilih kepala daerah dan anggota legislatif, masyarakat seperti memilih kucing dalam karung.”

Wartawan majalah Forum menambahkan ungkapan “membeli kucing dalam karung” sebagai pembuka berita, yang mana adalah sindiran menggelitik bagi DPR. Setiap orang tentu menyukai humor. Lead humor adalah salah satu lead menarik yang sering digunakan berbagai majalah, khususnya majalah politik, yang bertujuan untuk menyindir pihak yang dianggap bersalah. Dengan sindiran tersebut, pihak itu akan lebih dapat mengintrospeksi dirinya.

Majalah Forum Keadilan juga menyisipkan pernyataan-pernyataan yang menarik dalam tubuh berita, tidak hanya pada lead. Ada lima unsur syarat sebagai jurnalistik yang efektif, yaitu kecermatan dalam pemberitaan, organisasi dalam berita, diksi dan tatabahasa yang tepat, hemat kata, dan daya hidup, warna, imajinasi dalam tulisan.

Forum Keadilan sudah cermat dalam melakukan pemberitaan. Orang-orang yang diwawancarai dan pernyataan-pernyataan yang dipilih untuk disajikan kepada pembaca sudah mewakili atas topik yang akan dibahas dalam majalah. Majalah Forum menyertakan wawancara para pakar seperti Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Akademisi Universitas Sumatra Utara, dan Wakil Ketua

Komisi II DPR Hakam Nadja, karena memang mereka orang yang tepat untuk diwawancarai. Tidak hanya perihal masalah, namun juga solusi. Forum Keadilan tidak mewawancarai para parlemen yang bermasalah, karena informasi itu sudah terwakili dengan data yang diberikan oleh ICW.

Organisasi berita yang dilakukan Forum Keadilan juga sudah teratur, karena telah mengikuti standar majalah yang diketuai oleh redaktur pelaksana, Julie Indahrini. Ia akan mengorganisir wartawan-wartawan majalah Forum yang akan meliput, sehingga liputannya akan mengikuti keteraturan sesuai standar mereka. Hal ini akan berbeda bagi wartawan freelance yang akan mengorganisir berita sesuai kehendaknya sendiri.

Yang menarik adalah soal diksi atau pemilihan kata yang mereka lakukan. Menurut Kusumaningrat, diksi dalam penulisan berita harus tepat dan teratur agar penulis berita dapat menerapkan gaya retorika dalam penulisan beritanya untuk mencapai efek yang diinginkan. Majalah Forum banyak melakukan hal ini, yakni menggunakan pilihan-pilihan kata yang tajam, seperti “buruk rupa”, “ruangan pendingin”, “menyetor koruptor”, dan sebagainya. Pilihan-pilihan kata tersebut akan menggugah emosi sebagian pembaca untuk merasa kesal, marah, atau jengkel terhadap parlemen dan politisi.

Yang selanjutnya adalah hemat kata. Kata-kata yang ringkas dan jelas adalah hal yang perlu diperhatikan dalam dunia jurnalistik masa kini. Hal ini dikarenakan masyarakat hanya punya waktu sedikit dan tidak akan menghabiskannya untuk membaca kalimat yang panjang dan berbunga-bunga. Namun, peneliti menemukan

bahwa majalah Forum melakukan hal tersebut di sebagian kalimat pada beritanya, yakni banyak memasukkan bumbu-bumbu pemedas pada kalimat-kalimat berita. Selain itu, majalah Forum juga menuliskan daftar para legislator bermasalah dengan sangat detail, namun dengan jumlah yang sangat banyak yakni 23 paragraf yang menghabiskan dua halaman penuh majalah tersebut. Tentu saja hal ini akan membosankan untuk dibaca, dan bisa dibilang pemborosan pada halaman majalah. Majalah Forum tampaknya membuat paragraf-paragraf itu sebagai “filler” agar majalah tampak lebih penuh.

Terakhir adalah daya hidup, warna, dan imajinasi. Tulisan jurnalistik akan semakin enak untuk dibaca bila ada unsur seni di dalamnya. Majalah Forum melakukan hal tersebut dengan memberi banyak bumbu sarkastik dalam tulisan-tulisannya. Tujuannya satu, yaitu agar pembaca tertarik membaca sampai habis. Dan memang benar tulisan-tulisan di majalah Forum terkesan hidup dan enak dibaca, dan mempunyai karakter tersendiri, yaitu tajam dan mendramatisir dibanding majalah politik lain seperti Tempo dan Gatra yang cenderung lebih soft saat dibaca.

Bicara soal kepentingan media, hal itu selalu bervariasi dan terkadang berubah seiring perkembangan zaman. Pada zaman orde baru, media dikekang oleh pemerintah dengan segala kepentingannya, sehingga membuat beberapa media sering dibredel karena tak sejalan dengan pemerintah. Namun, sejak era reformasi sampai sekarang, kepentingan media pun berubah menjadi kepentingan pemilik media.

Saat tahun 1990-an, majalah Forum Keadilan sempat menjadi media mainstream terdepan, karena majalah pesaingnya yakni Tempo tengah dibredel oleh

pemerintah. Saat itu adalah masa kejayaan majalah Forum. Namun menginjak tahun 2000-an, majalah Forum agak merosot karena kurangnya dana. Majalah Forum yang dulunya sebagian ada yang berwarna, sekarang menjadi full hitam-putih kecuali sampulnya. Meski Forum Keadilan saat ini hanya bermodalkan kecil, namun mereka tetap menjalankan kegiatan jurnalistik sebagaimana mestinya. Mereka tetap punya kepentingan, yaitu kepentingan ekonomi. Bagaimana media itu bisa bertahan di pasaran, bisa dipilih oleh masyarakat di antara berbagai majalah lain yang berjejer.

Karena majalah Forum tidak sepopuler majalah Tempo atau Gatra, jarang sekali ada yang memasang iklan pada majalah ini. Faktor ketidakpopuleran dan layout yang hitam-putih adalah beberapa faktor penyebab pemasang iklan enggan mempromosikan produknya di majalah Forum, karena memasang iklan disitu tidak begitu menguntungkan bagi mereka. Majalah Forum hanya memiliki pemasukan tambahan dari berita advertorial daerah-daerah. Sebagian besar pendapatan majalah Forum adalah dari hasil penjualan majalah, maka dari itu mereka akan berusaha untuk membuat majalah mereka semenarik mungkin agar banyak dibeli.

Untuk menarik pembaca, redaksi majalah Forum harus berpikir mengenai isu apa yang paling menarik untuk diterbitkan di majalah Forum pada minggu depan, apa saja bahan-bahan berita yang harus dikumpulkan, bagaimana organisasi beritanya, dan bagaimana karakter redaksionalnya agar menarik untuk pembaca. maka dari itu, mereka memilih isu tentang anggota legislatif terlantik yang bermasalah pada waktu itu, karena itu isu yang hangat, serius, dan menarik untuk dikemas dalam pemberitaan feature majalah.

Berita majalah Forum yang membeberkan banyak kejelekan DPR dan politisi otomatis akan menanamkan ideologi kepada masyarakat bahwa kaum elit politik itu sungguh amat berdosa. Penanaman ide itu didiktekan oleh majalah Forum kepada para pembaca, sehingga sebagian pembaca menganggap pernyataan itu adalah hal yang wajar. Meski majalah ini juga ingin mengambil keuntungan secara finansial, mereka juga sekaligus dapat menanam suatu ideologi pada masyarakat. Disitulah letak kekuasaan media.

Pers yang baik adalah pers yang mengikuti kaidah kode etik jurnalistik dan tidak mengedepankan faktor keuangan sebagai tujuan utama. Salah satu contoh pers yang baik, yaitu harus mencerminkan prinsip-prinsip jurnalistik, yaitu akurasi, integritas, dan adil (Nasution, 2007: 23).

Untuk perihal akurasi, majalah Forum sudah melakukannya dengan baik. Seluruh informasi dalam rubrik tersebut adalah fakta dan memiliki sumber yang jelas. Mereka mengumpulkan data dari Indonesian Corruption Watch, lalu mewawancarai orang-orang yang berkompeten seperti Hakam Nadja, Abdullah Dahlan, Mirza Nasution, Musni Umar, dan beberapa orang lainnya. Meskipun begitu, data-data yang diperoleh majalah Forum di berita ini cenderung simpel, monoton dan dlebih-lebihkan, tidak sekompleks isi berita yang disajikan majalah lain semisal Tempo. Akan lebih baik jika majalah Forum menggali permasalahan ini lebih dalam lagi dengan membuat lebih banyak lagi angle dalam beritanya, tak hanya berfokus pada keburukan parlemen.

Sementara untuk masalah integritas, majalah Forum tidak membelokkan informasi untuk kepentingan tertentu, tapi justru memberi penegasan lebih lanjut. Contohnya adalah penembahan kalimat “membunuh, memperkosa” untuk menggambarkan kemungkinan perilaku caleg yang akan dipilih rakyat. Hal ini sah-sah saja, namun dapat memicu emosi sebagian pembaca. Gaya penulisan seperti ini selalu ditemukan di berbagai kalimat berita, maka penulis menganggapnya sebagai ciri khas dari majalah Forum Keadilan.

Untuk unsur adil, majalah Forum cukup adil dalam menuliskan berita. namun, fakta yang mereka dapatkan kerap kali diberikan unsur yang melebih-lebihkan atau hiperbola. Dalam berita yang diteliti, pengemasannya kurang berimbang karena banyak berpihak pada masyarakat dan banyak pula menyudutkan DPR dan politisi. Meskipun berdasarkan fakta, akan lebih baik jika Forum dapat mengemas berita ini menjadi tetap menarik untuk dilahap sampai habis, namun tidak dengan cara “mengompori” dengan banyak menyudutkan pihak tertentu.